



DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima (2013), Skripsi: *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*, Universitas Negeri Surabaya (Dipublikasikan).
- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Method*, Edisi 12, Singapore: McGraww-Hill.
- Damayanti, Ni Putu Dian & I Putu Ery Setiawan. (2014), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013*.
- Halim, Abdul., Icuk Rangga Bawono & Amin Dara (2014), *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniasih, Atik (2017), Skripsi: *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Depok)*, Universitas Bina Nusantara (Dipublikasikan).
- Mardiarmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2016, Yogyakarta: ANDI.
- Naratama, Benedictus Bina 2015 *Nunggak PBB, 40 Bangunan Perusahaan disegel*, diakses pada 15 September 2017, <http://m.kontan.co.id/news/nunggak-pbb-40-bangunan-perusahaan-dki-disegel>
- Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan., diakses Tanggal 23 Juni 2017.
- Rachmi, 2016 *Penerimaan PBB-P2 di Jaksel Masih Jauh dari Target*, diakses pada 15 September 2017, <http://poskotanews.com/2016/08/24/penerimaan-pbb-p2-di-jaksel-masih-jauh-dari-target/>
- Republik Indonesia. 1994. *Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 Tentang Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan bangunan*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*



Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.*

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 Tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.*

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.*

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*

Romanda, Candra. (2015), *Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.*

Saputro, Rudi., Megah Sujana & Devi F. Azizah (2014), *Jurnal: Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Universitas Brawijaya.*

Tarigan, Khusuma W. (2013), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado.* Jurnal EMBA Vol. 1 No.3.

Tata Cara Penagihan Pajak, diakses 28 Februari 2017, <http://stanerss.blogspot.co.id>.

Utiahman, Nur Riza., Een N. Walewangko & Hanly F. Dj. Siwu. (2016), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.*